

# PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA BARAT 2014

## OUTLINE ANALISIS PROVINSI

1. Perkembangan Indikator Utama
  - 1.1 Pertumbuhan Ekonomi
  - 1.2 Pengurangan Pengangguran
  - 1.3 Pengurangan Kemiskinan
2. Kinerja Pembangunan Kota/ Kabupaten
  - 2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan kemiskinan
  - 2.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM
  - 2.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran
  - 2.4 Kesenjangan Wilayah
3. Penyebab Permasalahan Pembangunan
  - 3.1 Tingginya Ketergantungan terhadap Sektor Primer (Pertanian)
  - 3.2 Kurangnya Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
  - 3.3 Rendahnya Kualitas lapangan Kerja
  - 3.4 Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah
  - 3.5 Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia
  - 3.6 Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat
  - 3.7 Rendahnya Kualitas Belanja Daerah
4. Prospek Pembangunan Tahun 2015
5. Penutup
  - 5.1 Isu Strategis Daerah
  - 5.2 Rekomendasi Kebijakan



Desember 2014

*SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH*



# Perkembangan Pembangunan Provinsi Papua Barat 2014

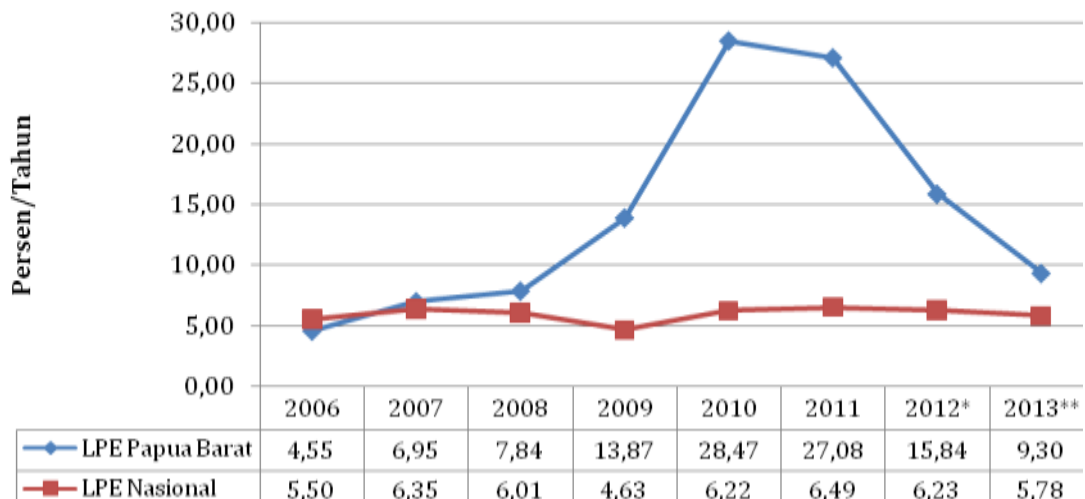
## SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

### A. Perkembangan Indikator Utama

#### 1. Pertumbuhan Ekonomi

Potensi Provinsi Papua Barat adalah pada sektor pertanian, pertambangan, dan jasa. Pertumbuhan ekonomi Papua Barat sangat dipengaruhi oleh perbaikan produksi pada sektor pertanian dan pertambangan. Perekonomian di provinsi ini tumbuh secara signifikan didorong oleh pertumbuhan sektor pertanian dan sektor industri pengolahan berupa peningkatan produksi LNG tangguh. Kinerja perekonomian Papua Barat baik dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 14,24 persen pada periode 2006-2013. Laju pertumbuhan di provinsi ini selalu lebih tinggi dari rata-rata perekonomian nasional yang berada pada angka 5,90 persen per tahun pada periode yang sama (Gambar 1). Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi 2006-2013 14,24. Perekonomian Papua Barat berkontribusi sebesar 35,48 persen terhadap pembentukan PDRB Wilayah Pulau Papua dan turut menyumbang 0,64 persen terhadap pembentukan PDB nasional pada tahun 2012.

**Gambar 1**  
Laju Pertumbuhan PRDB ADHK 2000

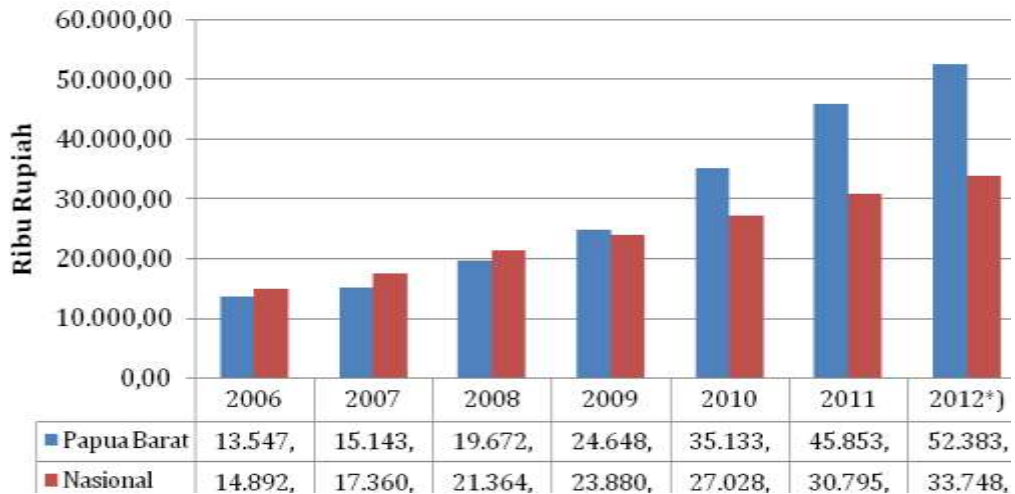


Sumber: BPS, 2013

Kinerja pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dari besarnya PDRB per kapita di Papua Barat selama kurun waktu 2006-2012 cenderung meningkat, menunjukkan kesejahteraan di Provinsi Papua Barat juga meningkat dan relatif baik secara nasional sejak tahun 2009. Jika pada tahun 2006 rasio antara PDRB perkapita Papua Barat dan PDB

nasional sebesar 90,97 persen, maka pada tahun 2012 rasionya meningkat menjadi 155,22 persen (Gambar 2).

**Gambar 2**  
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku

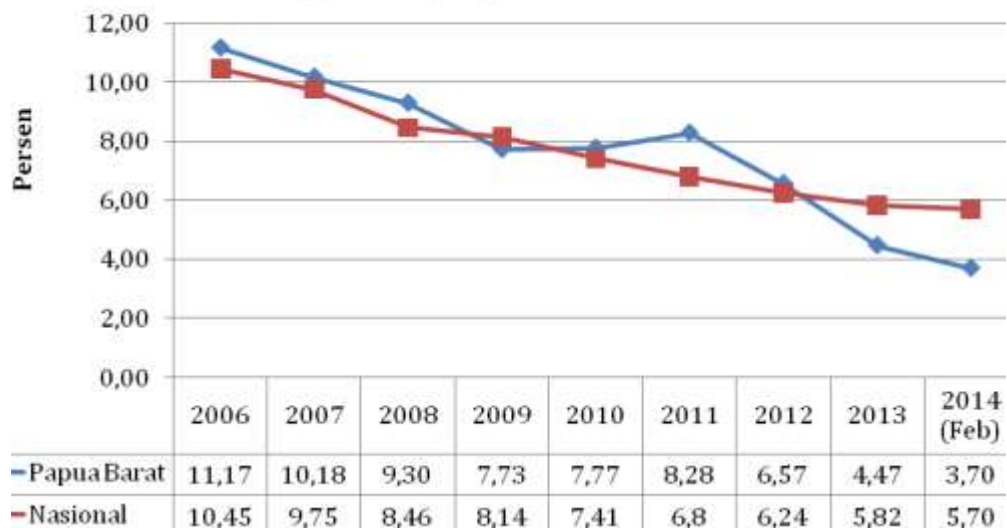


Sumber: BPS, 2013

## 2. Pengurangan Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Papua Barat selama 2006-2013 berkurang sebesar 6,70 persen. Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran wilayah cenderung menurun dan berada di bawah rata-rata tingkat pengangguran nasional (Gambar 3). Namun demikian, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Papua Barat pada periode tersebut tidak sebanding dengan peningkatan angkatan kerja.

**Gambar 3**  
Tingkat Pengangguran Terbuka

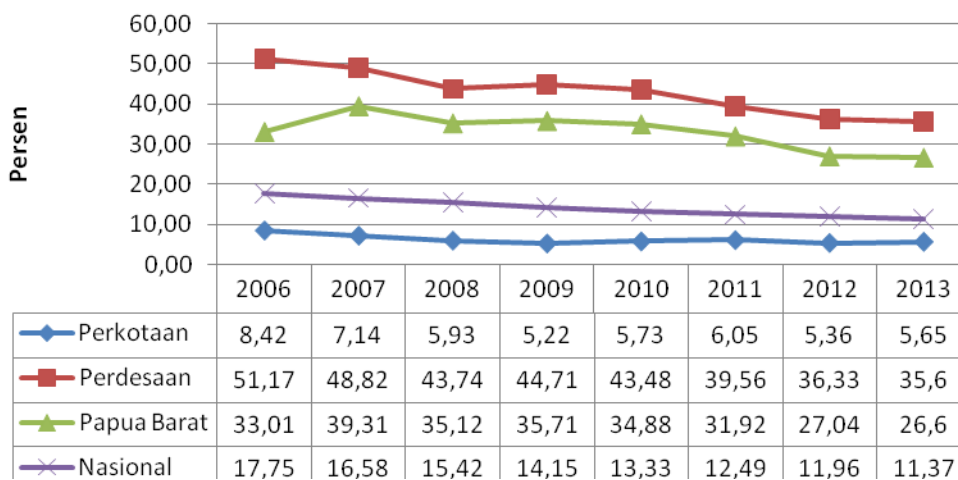


Sumber: BPS, 2014

### 3. Pengurangan Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi kurang memberikan pengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat. Selama kurun waktu 2006-2013 persentase penduduk miskin di provinsi ini berkurang sebesar 6,34 persen namun masih menempati urutan tertinggi kedua setelah Papua secara nasional. Persentase penduduk miskin di Papua Barat tergolong tinggi dan lebih tinggi dari persentase penduduk miskin nasional (Gambar 4). Kemiskinan di Papua Barat disebabkan karena kemiskinan struktural, yaitu akibat struktur sosial dalam masyarakat. Masyarakat Papua Barat kurang mampu memanfaatkan pengelolaan sumber daya alam yang melimpah dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan tingkat pendidikan yang dimiliki.

**Gambar 4**  
**Persentase Penduduk Miskin**



Sumber: BPS, 2013

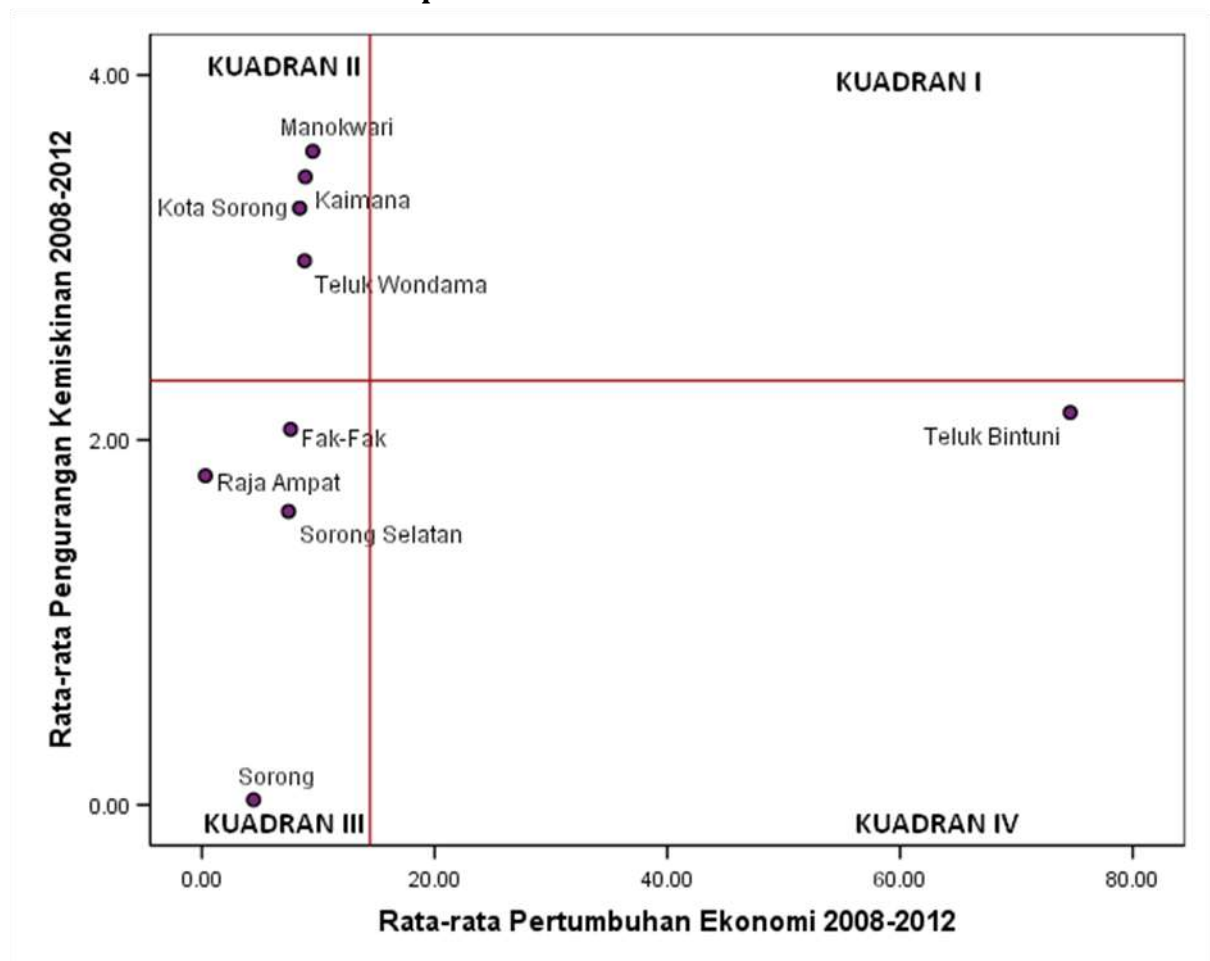
## B. Kinerja Pembangunan Kabupaten/ Kota

Kualitas pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh pengurangan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta perluasan lapangan kerja.

### 1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan

Gambar 5 menunjukkan persebaran kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, dengan penjelasan sebagai berikut. *Pertama*, di Papua Barat tidak ada kota atau kabupaten dengan yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Pada kuadran ini, pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat mendorong pengurangan kemiskinan secara lebih cepat (*pro-growth, pro-poor*). Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah yang tergolong pada kuadran I adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan..

**Gambar 5**  
**Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin**  
**Papua Barat Tahun 2008-2012**



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

*Kedua*, Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Kaimana, dan Teluk Wondama terletak di kuadran II, termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata tetapi pengurangan kemiskinan di atas rata-rata (*low growth, pro-poor*). Tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan dan jasa.

*Ketiga*, Kabupaten Sorong Selatan, Raja Ampat, Fak-fak, dan Sorong terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-poor*). Kinerja pembangunan daerah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari golongan miskin.

Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan.

*Keempat*, Kabupaten Teluk Bintuni terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro poor*). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum memberi dampak penurunan angka kemiskinan secara nyata. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Tantangan lainnya adalah meningkatkan koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

## 2. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM

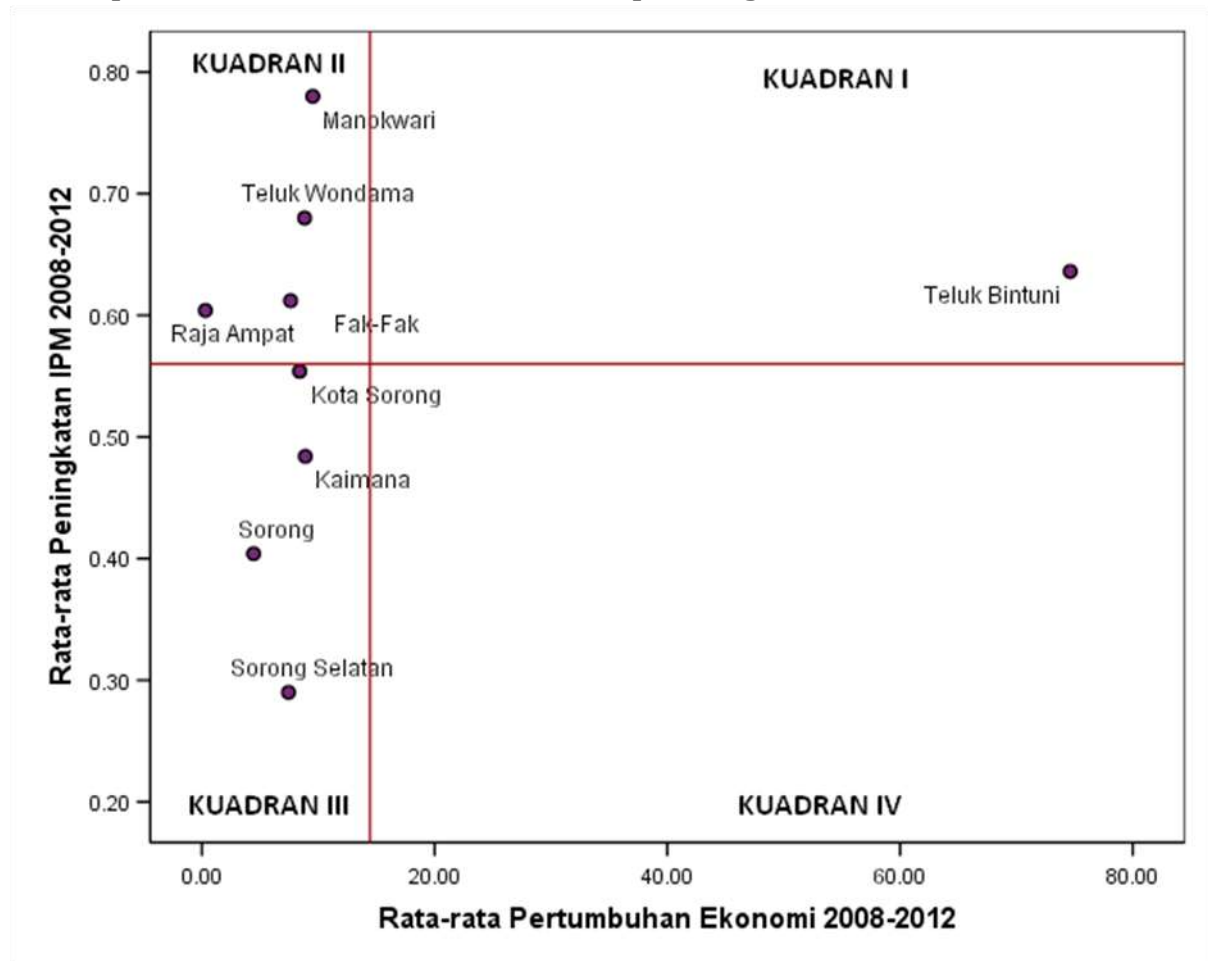
Gambar 6 menunjukkan distribusi kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama tahun 2008-2012. *Pertama*, Kabupaten Teluk Bintuni terletak di kuadran I, merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan IPM (*pro-growth, pro-human development*). Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

*Kedua*, Kabupaten Fakfak, Manokwari, Teluk Wondama, dan Raja Ampat yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi peningkatan IPM di atas rata-rata (*low growth, pro-human development*). Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat meningkatkan IPM. Tantangan yang harus diatasi adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya lokal seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

*Ketiga*, Kabupaten Sorong Selatan, Sorong, Kaimana, dan Kota Sorong terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-human development*). Kondisi ini menegaskan perlunya pemerintah daerah membenahi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus bekerja keras mendorong seluruh SKPD untuk memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah. *Keempat*, Tidak ada kabupaten atau kota di Papua Barat yang terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro human development*).



**Gambar 6**  
**Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Peningkatan IPM Tahun 2008-2012**



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

### 3. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran

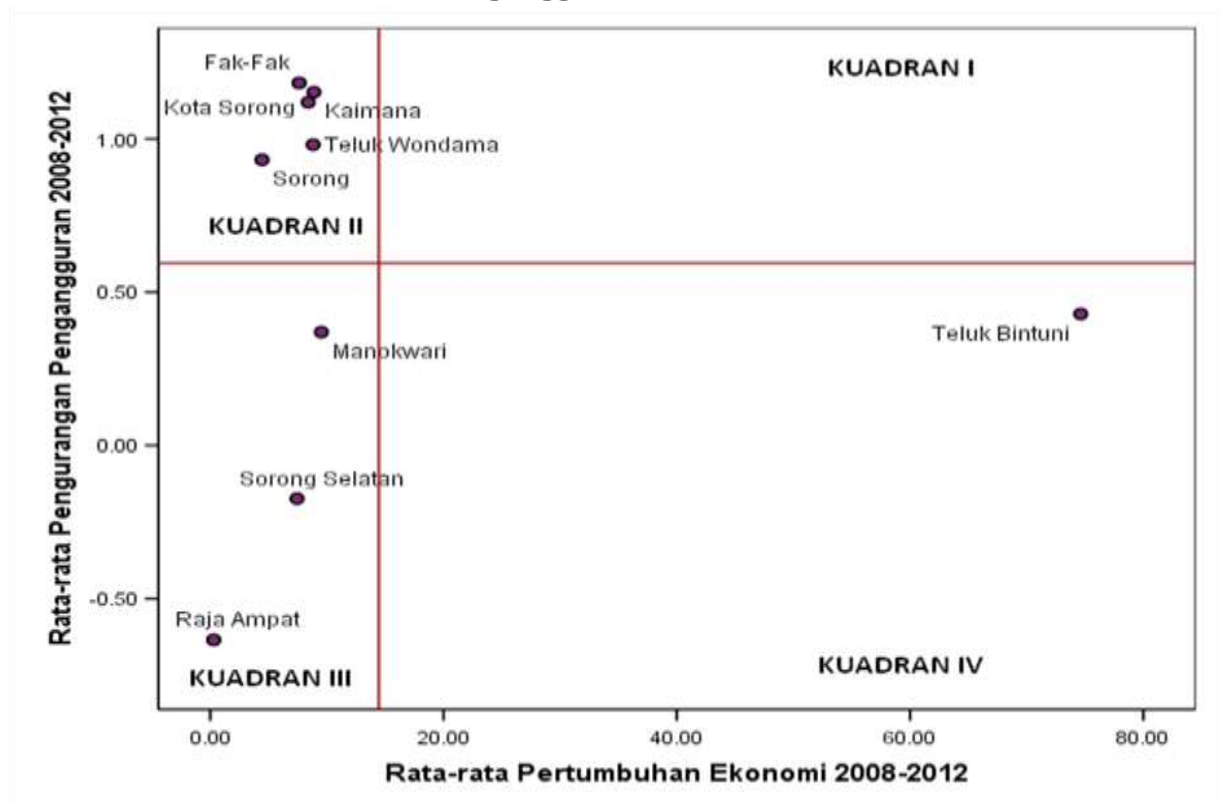
Gambar 7 menunjukkan persebaran kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran selama tahun 2008-2012. *Pertama*, Tidak ada kota atau kabupaten di Papua Barat yang terletak di kuadran I dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (*pro-growth, pro-job*). Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

*Kedua*, Kabupaten Fakfak, Kaimana, Teluk Wondama, Sorong, dan Kota Sorong yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di atas rata-rata (*low growth, pro-job*). Hal ini mengindikasikan bahwa perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti pertanian dan perikanan.



*Ketiga*, Kabupaten Raja Ampat, Sorong Selatan dan Manokwari terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-job*). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar. *Keempat*, Tidak ada kabupaten atau kota yang terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro job*).

**Gambar 7**  
**Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Rata-Rata Pengurangan Jumlah Pengangguran Tahun 2008-2012**

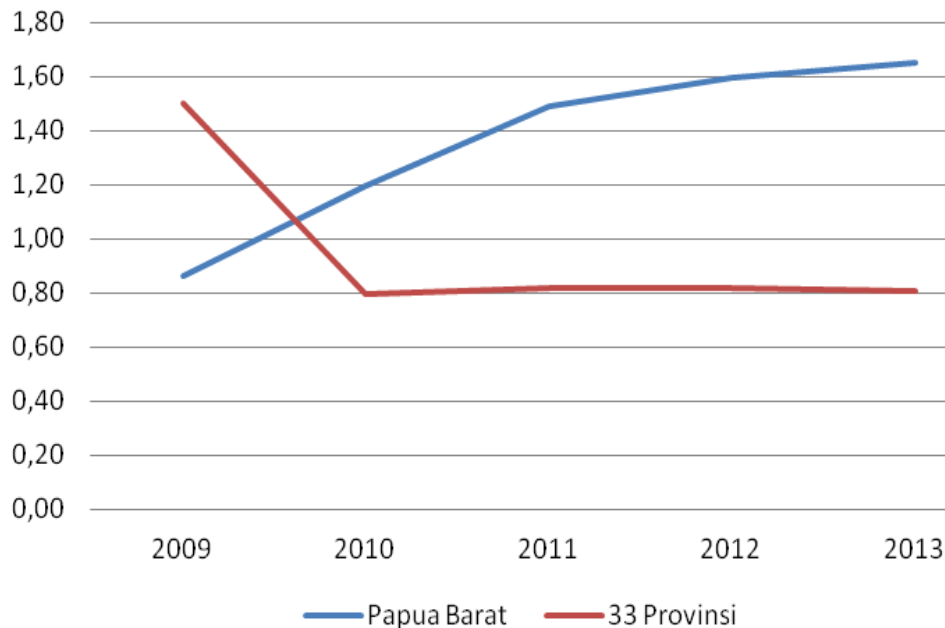


Sumber: BPS, 2012 (diolah)

#### 4. Kesenjangan Ekonomi

Tingkat kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Papua Barat yang ditunjukkan dengan nilai indeks wiliamson dari tahun 2009-2013 cukup tinggi. Kesenjangan ekonomi di Provinsi Papua Barat berada jauh di atas rata-rata nasional dengan kecenderungan semakin meningkat. Penyebab kesenjangan ekonomi dan sosial di Papua Barat antara lain jarak kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi yang terbatas. Kesenjangan dalam perekonomian menimbulkan disparitas terutama melonjaknya harga barang kebutuhan pokok.

**Gambar 8**  
**Perkembangan Kesenjangan Ekonomi (Indeks Williamson) 2009-2013**



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Pertumbuhan ekonomi Papua Barat cukup tinggi walaupun distribusi pendapatannya kurang merata di seluruh kabupaten/ kota di provinsi ini, terlihat dari besarnya gap antara kabupaten atau kota dengan PDRB perkapita tertinggi dan PDRB perkapita terendah (Tabel 1). PDRB perkapita di Kota Sorong tinggi karena selain memiliki aksesibilitas yang tinggi pada jalur transportasi utama, Kota Sorong juga menjadi pusat kegiatan perekonomian yang juga menyerap sumber daya dari *hinterland* nya sehingga masyarakat di wilayah ini menikmati pendapatan perkapita yang lebih tinggi, angka kemiskinan lebih rendah, dan kualitas SDM yang lebih baik. PDRB perkapita di Kabupaten Teluk Bintuni tinggi namun tidak mencerminkan tingkat kemakmuran yang tinggi di wilayah tersebut karena tingkat kemiskinan juga tinggi. Potensi sumber daya alam di Papua Barat melimpah namun beberapa kabupaten di provinsi ini masih menjadi daerah tertinggal. Keberadaan investasi asing di Papua Barat juga tidak menyumbangkan pembangunan secara signifikan.

**Tabel 1**  
**Perkembangan Nilai PDRB Perkapita ADHB dengan Migas Kabupaten/Kota di Papua Barat Tahun 2007-2012 (000/jiwa)**

Kab/ Kota	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fak-Fak	14.716	17.524	19.646	22.674	24.862	27.876
Kaimana	13.073	15.311	17.071	19.065	21.059	23.207
Teluk Wondama	8.790	12.098	14.221	14.979	16.403	17.577
Teluk Bintuni	15.139	18.557	38.401	165.772	280.377	351.561
Manokwari	9.953	12.466	14.122	15.592	17.135	8.735
Sorong Selatan	5.342	6.713	9.356	10.366	11.917	13.409

Sorong	44.882	63.008	82.118	86.629	93.008	95.302
Raja Ampat	20.016	23.048	25.386	26.604	25.394	27.083
Tambrauw	-	-	5.787	6.724	7.334	8.395
Maybrat	-	-	5.073	5.625	6.215	6.718
Kota Sorong	11.211	13.743	14.921	16.551	18.584	20.360
<b>PAPUA BARAT</b>	<b>15.143</b>	<b>19.690</b>	<b>24.649</b>	<b>35.134</b>	<b>56.853</b>	<b>52.384</b>

Sumber: BPS, 2013

## C. Penyebab Permasalahan Pembangunan

### 1. Tingginya Ketergantungan pada Sektor Primer (Pertanian)

Struktur perekonomian suatu daerah sangat dipengaruhi oleh besarnya peranan masing-masing sektor ekonomi dalam membentuk nilai tambah PDRB. Struktur perekonomian di Papua Barat didominasi oleh sektor industri pengolahan, pertanian, dan konstruksi (Tabel 2). Sektor pertanian didominasi oleh sektor kehutanan dan perikanan yang mampu memberikan nilai tambah terhadap perekonomian di wilayah ini walaupun peranannya semakin menurun dan digantikan oleh sektor industri pengolahan yang memiliki laju pertumbuhan tinggi. Tingginya sektor industri pengolahan sebagian besar dikontribusikan dari industri migas. Sektor industri pengolahan yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi tidak banyak menyerap tenaga kerja. Sektor pertanian yang menjadi tumpuan sebagian besar penduduk bekerja di Papua Barat memiliki tingkat produktivitas rendah dan belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

**Tabel 2**  
**Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha (2013)**

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Pertanian	11,65	14,27
2.	Pertambangan	5,69	8,11
3.	Industri Pengolahan	54,28	47,18
4.	Listrik, Gas, Air Minum	0,30	0,29
5.	Konstruksi	7,73	6,70
6.	Perdagangan, Hotel, Restoran	6,90	6,80
7.	Angkutan, Telekomunikasi	4,75	5,57
8.	Keuangan	1,98	1,74
9.	Jasa-jasa	6,72	9,34
		100,00	100,00

Sumber: BPS, 2013

Berdasarkan analisis sektor basis (Tabel 3), subsektor pertanian untuk komoditas perkebunan, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan serta sub sektor industri migas merupakan sektor-sektor I (dapat diperdagangkan antardaerah), dengan nilai satu ( $LQ > 1$ ). Hal ini menunjukkan Papua Barat memiliki *proportional share* lebih besar dari rata-rata daerah lain untuk sektor-sektor tersebut.

**Tabel 3**  
**Nilai LQ Sektor Perekonomian Papua Barat 2008-2012**

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
<b>1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan</b>	2,09	1,92	1,63	1,35	1,20
a. Tanaman Bahan Makanan	0,74	0,69	0,61	0,49	0,45
b. Tanaman Perkebunan	1,31	1,25	1,05	0,93	0,84
c. Peternakan	0,96	0,93	0,79	0,66	0,62
d. Kehutanan	10,21	9,20	7,65	6,42	5,85
e. Perikanan	4,95	4,56	3,82	3,04	2,61
<b>2. Pertambangan dan Penggalian</b>	2,08	1,82	1,44	1,26	1,20
a. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	3,58	3,26	2,63	2,35	2,34
b. Pertambangan Bukan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Penggalian	0,89	0,85	0,75	0,65	0,65
<b>3. Industri Pengolahan</b>	0,51	0,72	1,25	1,62	1,80
a. Industri Migas	2,48	5,10	12,72	19,06	23,64
1). Pengilangan Minyak Bumi	5,65	5,79	4,86	4,13	3,91
2). Gas Alam Cair (LNG)	0,00	4,56	19,21	31,73	40,66
b. Industri Bukan Migas	0,33	0,32	0,26	0,23	0,21
<b>4. Listrik, Gas &amp; Air Bersih</b>	0,63	0,56	0,47	0,41	0,38
a. Listrik	0,67	0,60	0,51	0,43	0,40
b. Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Air Bersih	1,41	1,52	1,30	1,06	1,02
<b>5. Konstruksi</b>	1,44	1,40	1,18	1,05	1,01
<b>6. Perdagangan, Hotel &amp; Restoran</b>	0,60	0,58	0,46	0,39	0,37
a. Perdagangan Besar dan Eceran	0,66	0,64	0,50	0,42	0,39
b. Hotel	0,30	0,30	0,26	0,22	0,20
c. Restoran	0,31	0,32	0,28	0,26	0,24
<b>7. Pengangkutan dan Komunikasi</b>	0,93	0,86	0,69	0,59	0,54
a. Pengangkutan	1,35	1,32	1,10	0,95	0,89
1). Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2). Angkutan Jalan Raya	1,37	1,38	1,17	0,99	0,93
3). Angkutan Laut	4,10	4,12	3,68	3,33	3,16
4). Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	1,11	1,08	0,83	0,74	0,64
5). Angkutan Udara	0,70	0,66	0,51	0,44	0,43
6). Jasa Penunjang Angkutan	0,51	0,50	0,42	0,36	0,35
b. Komunikasi	0,58	0,53	0,42	0,36	0,34
<b>8. Keuangan, Real Estate &amp; Jasa Perusahaan</b>	0,25	0,27	0,22	0,19	0,18
a. Bank	0,28	0,35	0,29	0,26	0,23
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	0,28	0,25	0,20	0,17	0,15
c. Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Real Estat	0,31	0,29	0,25	0,21	0,19
e. Jasa Perusahaan	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
<b>9. Jasa-jasa</b>	1,16	1,14	1,07	1,03	1,01
a. Pemerintahan Umum	2,36	2,35	2,27	2,24	2,27
b. Swasta	0,23	0,22	0,18	0,15	0,14
1). Jasa Sosial Kemasyarakatan	0,48	0,44	0,37	0,31	0,28
2). Jasa Hiburan dan Rekreasi	1,05	0,96	0,82	0,69	0,64
3). Jasa Perorangan dan Rumah tangga	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03

Nilai LQ dihitung menggunakan PDRB ADHK Tahun 2000

Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Beberapa indikator di atas menekankan pentingnya pengembangan komoditas tanaman pangan dan peternakan yang menjadi tumpuan sebagian tenaga kerja di Papua Barat, serta pengembangan sektor industri pengolahan non migas. Ada dua alasan yang mendukung hal tersebut. *Pertama*, sektor pertanian primer memiliki elastisitas permintaan yang rendah terhadap pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan relatif bertahannya kinerja pertumbuhan sektor pertanian di masa krisis, namun ketika situasi ekonomi membaik dan pendapatan masyarakat meningkat permintaan terhadap komoditas pertanian tidak meningkat dengan proporsi yang sama. Berbeda halnya dengan permintaan terhadap produk manufaktur, yang sangat elastis terhadap peningkatan pendapatan. Kedua, sektor industri pengolahan non migas sangat potensial dalam menciptakan nilai tambah, mendorong perkembangan sektor-sektor lain (*multiplier effect*), dan menciptakan lapangan kerja.

**Tabel 4**  
**Perubahan Jumlah Orang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan**  
**Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2014**

No.	Lapangan Pekerjaan	2010	2014 (Feb)	Perubahan
1	Pertanian	173.803	191.714	17.911
2	Pertambangan	11.323	6.808	-4.515
3	Industri Pengolahan	10.208	15.995	5.787
4	Listrik, Gas, Air	1.134	1.507	373
5	Bangunan	13.153	22.980	9.827
6	Perdagangan, Hotel, Restoran	41.668	53.705	12.037
7	Angkutan & Telekomunikasi	19.312	17.265	-2.047
8	Keuangan	3.757	4.445	688
9	Jasa-Jasa	62.532	78.215	15.683
	<b>Total</b>	<b>336.890</b>	<b>392.634</b>	<b>55.744</b>

Sumber: BPS, 2014

Selama periode 2010-2014, sektor pertanian, sektor jasa-jasa, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran mampu menciptakan lapangan kerja secara signifikan, sementara perubahan jumlah orang bekerja di sektor pertambangan dan angkutan dan telekomunikasi cenderung menurun (Tabel 4). Pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran, hal ini dapat berkaitan dengan kemudahan memperoleh lapangan kerja secara

informal bagi angkatan kerja. Ke depan, sektor industri pengolahan terutama non migas masih perlu berkembang lagi sehingga mampu menyerap angkatan kerja baru dan menyerap tenaga kerja yang menumpuk di sektor pertanian, jasa-jasa, dan sektor perdagangan dengan status informal yang kurang produktif.

## 2. Kurangnya sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Dari sisi pengeluaran (penggunaan) pendorong utama pertumbuhan ekonomi selama 2006-2013 adalah pada sektor ekspor, impor, dan konsumsi rumah tangga (Tabel 5). Investasi berperan meningkatkan stok kapital di daerah yang digunakan untuk berproduksi. Tingkat investasi yang rendah akan diikuti oleh terbatasnya kemampuan daerah untuk memacu peningkatan produksi. Namun demikian terdapat kecenderungan meningkatnya pertumbuhan investasi. Investasi harus ditingkatkan peranannya terhadap PDRB dengan penyebaran yang semakin merata. Mengingat pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, hal yang perlu diperhatikan adalah kelembagaan yang ramah dunia usaha, antara lain melalui penyediaan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan, baik dalam hal biaya maupun waktu yang dibutuhkan. Ketersediaan infrastruktur dan kondisi keamanan yang kondusif juga memiliki peran penting dalam meningkatkan daya tarik investasi.

Kegiatan investasi di Provinsi Papua Barat sangat diperlukan dengan adanya kebijakan percepatan pembangunan di wilayah ini. Beberapa potensi untuk dikembangkannya investasi di wilayah ini antara lain sumber daya alam dengan kandungan minyak dan gas, kandungan mineral logam, sumber daya hutan dan perairan, pengembangan pertanian dan agribisnis, serta potensi pariwisata yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 5**  
**PDRB Provinsi Papua Barat Menurut Penggunaan 2013**

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Konsumsi Rumah Tangga	35,35	36,68
2.	Konsumsi Lembaga Nirlaba	0,37	0,40
3.	Konsumsi Pemerintah	13,47	11,44
4.	PMTB	24,63	20,12
5.	Perubahan Stok	9,86	-6,76
6.	Ekspor	52,76	78,85
7.	Impor	35,35	40,74
	Total	100,00	100,00

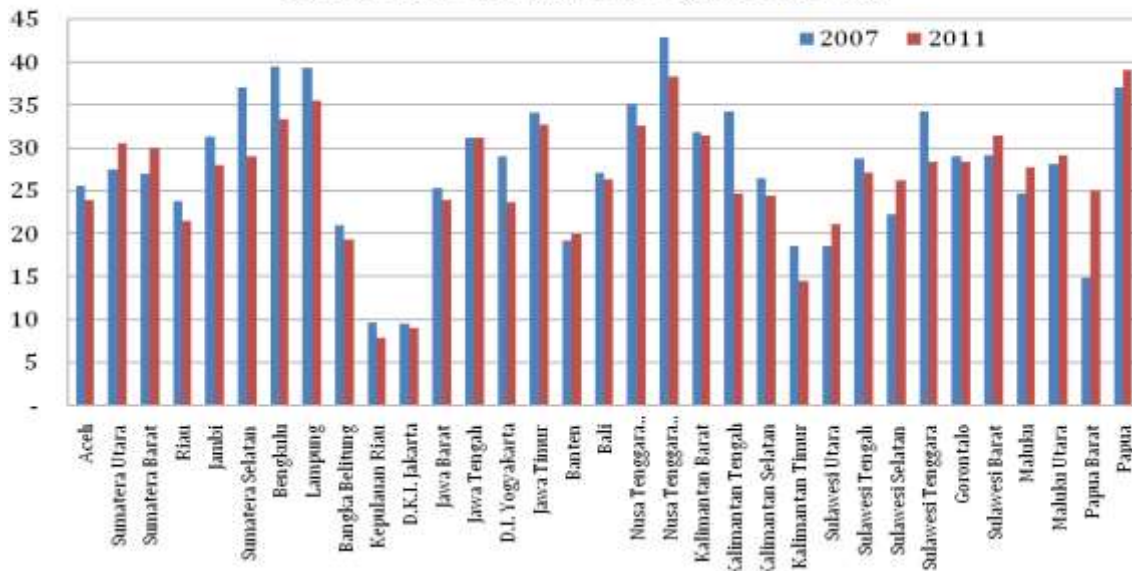
Sumber : BPS, 2013

## 3. Rendahnya Kualitas lapangan Kerja

Kualitas lapangan kerja ditunjukkan dari banyaknya pekerja yang bekerja di sektor informal. Mereka ini terhitung bekerja namun menghadapi ketidakpastian yang tinggi sehingga sangat rentan terhadap sedikit saja guncangan ekonomi yang terjadi. Porsi pekerjaan kurang berkualitas di Papua Barat meningkat dari tahun 2007 ke 2011 (Gambar 9). Pada tahun 2007 persentase pekerjaan kurang berkualitas di Papua Barat sebesar 14,90

persen, dan meningkat menjadi 25,01 persen pada tahun 2011. Kebijakan pembangunan sektor pertanian harus sejalan dengan kebijakan pembangunan di sektor industri karena rendahnya produktivitas pertanian. Pengembangan industri dapat diarahkan pada industri berbasis pertanian dalam arti luas, seperti agroindustri yang didukung oleh agrobisnis.

**Gambar 9**  
**Persentase Pekerjaan Kurang Berkualitas**



Sumber: BPS, 2012

#### 4. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor pendorong produktivitas daerah. Pembangunan ekonomi membutuhkan dukungan sarana transportasi dan ketersediaan jaringan listrik yang memadai. Pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua Barat menjadi salah satu kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat di pulau yang kaya sumber daya alam tersebut. Keberadaan infrastruktur seperti jalan raya dan jembatan akan mampu membuka akses bagi masyarakat untuk melaksanakan aktivitas ekonomi. Tingkat kerapatan jalan di Papua Barat secara nasional tergolong rendah (Tabel 6). Tingkat kerapatan jalan merupakan rasio panjang jalan dalam kilometer terhadap luas wilayah dalam kilometer persegi, dan dinyatakan dalam persen.

**Tabel 6**  
**Kerapatan Jalan dan PDRB Per Kapita Provinsi Tahun 2012**

No	Provinsi	PDRB per kapita (Ribu Rp)	Kerapatan Jalan
1	DKI Jakarta	111.913	1.068,36
2	DIY	16.054	146,56
3	Bali	20.948	130,28
4	Jawa Timur	26.274	95,37
5	Jawa Tengah	16.864	88,75
6	Jawa Barat	21.274	72,08

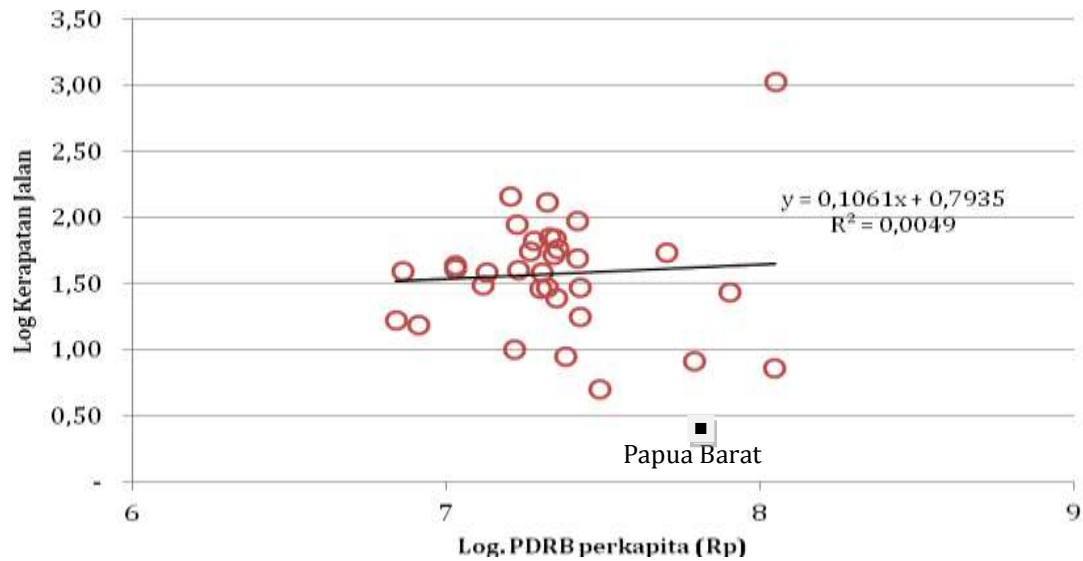


No	Provinsi	PDRB per kapita (Ribu Rp)	Kerapatan Jalan
7	Sulawesi Selatan	22.151	69,68
8	Banten	19.038	66,81
9	Sulawesi Utara	22.624	57,89
10	Lampung	18.460	56,44
11	Kep. Riau	50.174	54,95
12	Sumatera Barat	22.035	52,36
13	Sumatera Utara	26.185	49,50
14	NTB	10.691	43,55
15	Gorontalo	10.703	40,85
16	Sulawesi Barat	17.012	40,62
17	NTT	7.236	39,95
18	Bengkulu	13.522	38,99
19	Aceh	20.164	38,76
20	Sulawesi Tenggara	13.112	30,71
21	Kep. Bangka Belitung	26.784	29,93
22	Sulawesi Tengah	21.052	29,73
23	Kalimantan Selatan	20.051	29,28
24	Riau	79.786	27,25
25	Jambi	22.508	24,81
26	Sumatera Selatan	26.742	17,86
27	Maluku Utara	6.929	16,72
28	Maluku	8.134	15,39
19	Kalimantan Barat	16.421	10,00
30	Kalimantan Tengah	23.987	8,96
<b>31</b>	<b>Papua Barat</b>	<b>61.462</b>	<b>8,24</b>
32	Kalimantan Timur	111.210	7,22
33	Papua	30.713	5,06
	<b>Indonesia</b>	<b>33.531</b>	<b>25,99</b>

Sumber: BPS (2012), Statistik Kementerian PU (2013)

Berdasarkan asumsi terdapat korelasi antara tingkat kerapatan jalan dan tingkat pendapatan perkapita dalam suatu perekonomian, dengan menggunakan data 33 provinsi terlihat hubungan positif antara PDRB per kapita dan tingkat kerapatan jalan (Gambar 10). Semakin tinggi pendapatan per kapita wilayah kerapatan jalannya cenderung tinggi pula. Provinsi-provinsi yang posisinya di bawah kurva linier tersebut berarti mengalami defisiensi infrastruktur jalan. Dengan menggunakan ukuran ini terlihat bahwa posisi Papua Barat relatif tidak lebih baik dibandingkan perekonomian dengan tingkat pendapatan per kapita yang sama. Papua Barat mengalami defisiensi infrastruktur jalan.

**Gambar 10**  
**Hubungan antara Kerapatan Jalan dan GDP Per Kapita Tahun 2012**



Sumber: BPS (2013), Statistik Kementerian PU (2013)-diolah

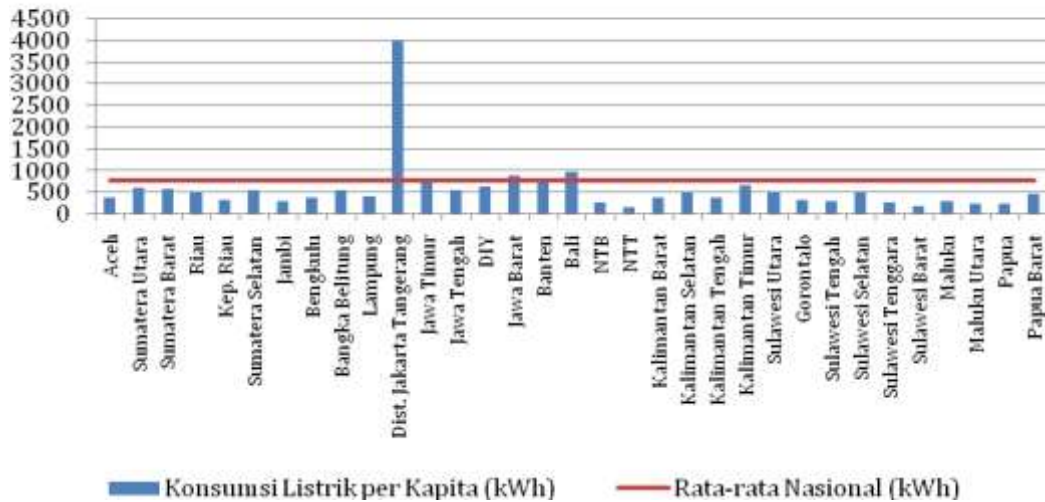
Secara kualitas, kondisi jalan di Papua Barat relatif baik, ditunjukkan dari panjang jalan yang sudah beraspal di provinsi ini. Permukaan jalan beraspal di Papua Barat sudah mencapai di atas 50 persen pada tahun 2012 (Tabel 7), menunjukkan daya dukung jalan untuk pergerakan barang relatif baik. Kondisi jalan yang buruk akan meningkatkan waktu tempuh perjalanan dan membengkakkan biaya distribusi barang antar daerah, yang pada gilirannya menghambat perekonomian daerah. Dengan adanya perbedaan kapasitas fiskal antardaerah, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi upaya peningkatan integrasi jaringan jalan antarwilayah.

**Tabel 7**  
**Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Tahun 2012**

PROVINSI	JENIS PERMUKAAN JALAN								Total	
	Aspal		Kerikil		Tanah		Lainnya			
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Papua Barat	1.063	81	140	11	99	8	4	0	1.306	100
Wilayah Papua	2.586	81	341	11	239	8	13	0	3.179	100
INDONESIA	42.284	79	5018	9	3504	7	2836	5	53.642	100

Sumber: BPS, 2012

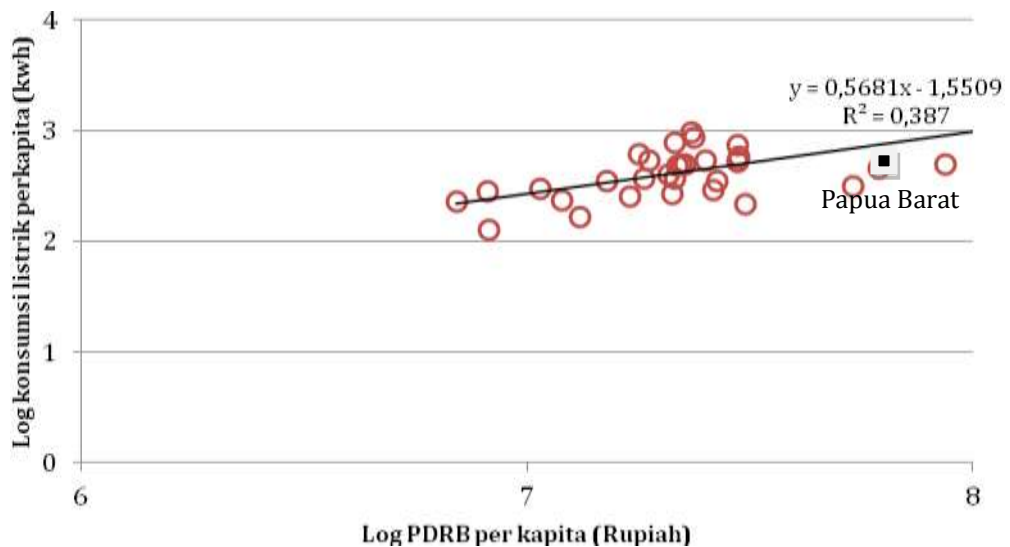
**Gambar 11**  
**Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) Tahun 2013**



Sumber: Statistik PLN, 2013

Infrastruktur lain yang mendorong produktivitas daerah adalah jaringan listrik. Konsumsi listrik di Papua Barat termasuk rendah dan kurang dari rata-rata tingkat konsumsi listrik nasional sebesar 753,7 kWh (Gambar 11). Untuk mengukur defisiensi terhadap infrastruktur kelistrikan digunakan cara yang sama, yaitu dengan melihat korelasi antara pendapatan perkapita dan konsumsi listrik perkapita terlihat hubungan yang positif antara PDB per kapita dengan tingkat konsumsi listrik (Gambar 12). Wilayah yang memiliki posisi di bawah kurva linier mengalami defisiensi infrastruktur listrik.

**Gambar 12**  
**Hubungan Konsumsi Listrik dan Pendapatan Tahun 2013**



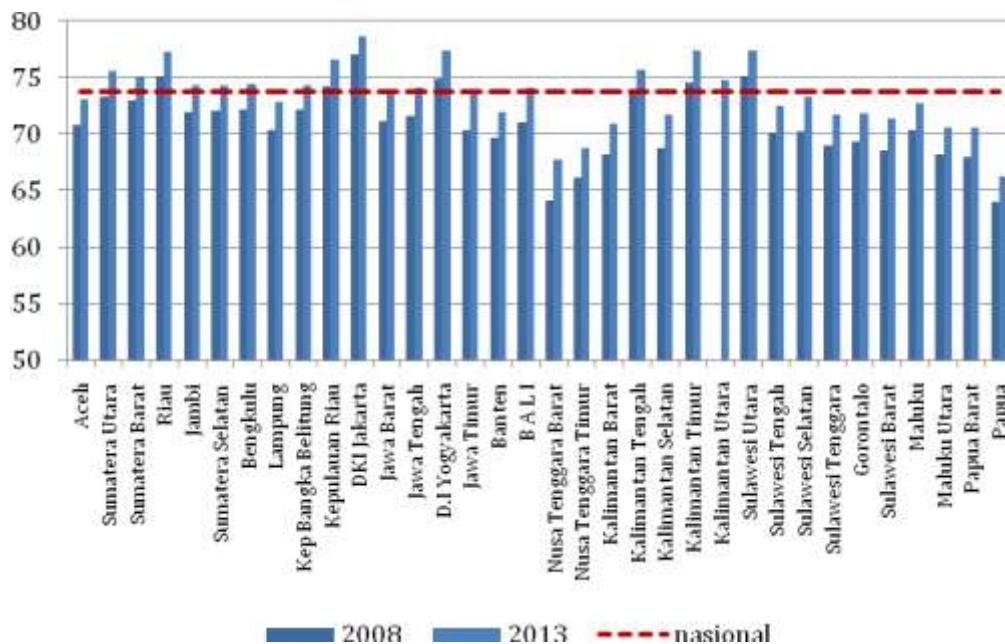
Sumber: BPS (2013), Statistik PLN (2013) - diolah

Semakin tinggi pendapatan perkapita suatu perekonomian, konsumsi listriknya cenderung semakin tinggi pula. Posisi Papua Barat berada di bawah kurva linier, menunjukkan konsumsi listrik Papua Barat jauh lebih rendah dari di provinsi-provinsi yang memiliki pendapatan perkapita sama. Dengan demikian, ketersediaan jaringan listrik merupakan salah satu masalah di Papua Barat.

### 5. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin produktif angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan. Kualitas sumber daya manusia di Papua Barat yang ditunjukkan melalui nilai IPM relatif meningkat tahun 2013 dibandingkan tahun 2008 namun masih jauh di bawah IPM nasional sebesar 73,81 (Gambar 13).

**Gambar 13**  
**Nilai IPM Provinsi di Indonesia Tahun 2007 dan 2012**



Sumber: BPS, 2013

IPM Papua Barat tergolong rendah karena berada pada peringkat 31 secara nasional 31 pada tahun 2013 dengan nilai IPM sebesar 70,62. Pada indikator usia harapan hidup, terjadi perbaikan dari 67,90 tahun pada tahun 2008 menjadi 69,14 tahun pada tahun 2013. Rata-rata lama sekolah di Papua Barat meningkat dari 7,67 tahun pada 2008 menjadi 8,53 tahun pada 2013. Sementara itu pada indikator angka melek huruf, capaian di Papua Barat pada tahun 2008 dan 2013 meningkat dari 92,15 menjadi 94,14 persen, setara dari capaian nasional 94,14 persen.

Apabila dilihat dari struktur angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, proporsi angkatan kerja di Papua Barat dengan ijazah minimal SMA meningkat dari 32,99 persen pada tahun 2008 menjadi 39,53 persen pada tahun 2014 (Tabel 8). Perbaikan kualitas angkatan kerja ini menjadi modal berharga untuk mendukung industrialisasi berbasis pertanian di Papua Barat.

**Tabel 8**  
**Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan**

No.	Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan	2008	2014	Perubahan
1	≤ SD	159.406	174.644	15.238
2	SMTp	70.032	71.905	1.873
3	SMTA Umum	86.746	101.986	15.240
5	Diploma I/II/III/Akademi	10.488	14.665	4.177
6	Universitas	15.710	44.507	28.797
<b>Total</b>		<b>342.382</b>	<b>407.707</b>	<b>65.325</b>

Sumber: BPS, 2014

## 6. Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat

Salah satu sumber pendanaan investasi dan usaha ekonomi masyarakat adalah tabungan masyarakat. Melalui fungsi intermediasi perbankan, tabungan masyarakat akan berkembang apabila dikonversi menjadi investasi di sektor-sektor produktif. Imbal hasil dari investasi ini sebagian akan dikonsumsi dan sebagian akan ditabung oleh masyarakat. Demikian seterusnya sehingga terjadi perputaran dan pertumbuhan ekonomi.

Rasio pinjaman terhadap simpanan di Papua Barat nilainya lebih kecil dari satu, menunjukkan rendahnya posisi pinjaman dibandingkan simpanan. Hal ini juga berarti kegiatan investasi di Papua Barat ditentukan oleh simpanan masyarakat. Rasio tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 0,92 (Tabel 9).

**Tabel 9**  
**Rasio Simpanan dan Pinjaman di Bank Umum dan BPR Tahun 2013**

Wilayah	Posisi Simpanan di Bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Posisi Pinjaman di bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan	Rasio PMTB terhadap Simpanan
Papua Barat	11.134	7.931	0,71	1,13
Nasional	3.575.891	3.322.683	0,92	0,47

Sumber: BPS, 2013

Rasio PMTB terhadap simpanan di Papua Barat nilainya lebih dari satu, menunjukkan tingginya investasi fisik di daerah. Investasi fisik ini diperkirakan lebih fokus pada pengembangan industri migas di wilayah ini. PMTB biasa disebut investasi fisik karena dihitung dari penanaman modal yang benar-benar menghasilkan nilai tambah dan bukan dihitung dari realisasi penanaman modal yang tercatat pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

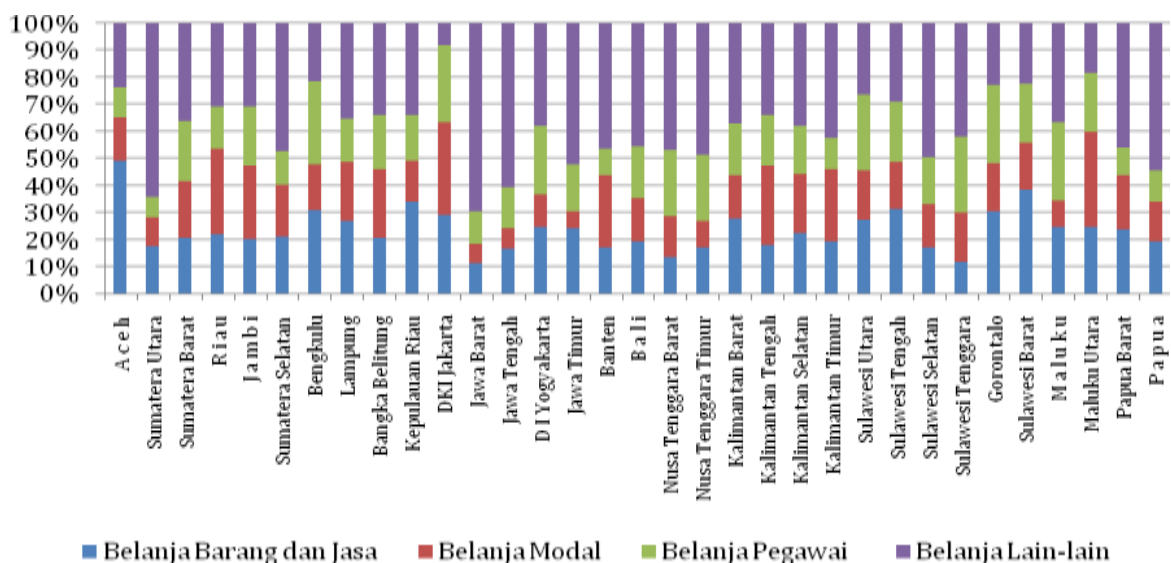
## 7. Rendahnya Kualitas Belanja Daerah

Investasi pemerintah yang umumnya merupakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana publik yang bersifat *non excludable* dan *non rivalry* memiliki peran yang tidak tergantikan dibandingkan dengan peran swasta. Peran pemerintah semakin penting di daerah-daerah relatif tertinggal, di mana tingkat investasi swasta masih rendah. Pada daerah-daerah ini investasi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan daya tarik daerah melalui pembangunan infrastruktur wilayah seperti jalan, listrik, irigasi, dan prasarana transportasi lainnya, serta peningkatan sumberdaya manusia (SDM). Tanpa itu, sulit diharapkan dunia usaha daerah dapat berkembang.

Komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan investasi publik dapat ditunjukkan melalui rasio belanja modal pemerintah daerah terhadap total belanja pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di Papua Barat. Rasio belanja modal di Papua Barat pada tahun 2013 sebesar 20,06 persen, dan rasio belanja pegawai sebesar 10,10 berada di bawah rata-rata nasional (Gambar 14). Kondisi ini belum cukup memacu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM. Pemerintah perlu melakukan upaya pengembangan program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan SDM secara tepat dan berkelanjutan, dengan alokasi anggaran yang memadai.

Dana Otonomi Khusus Papua tahun 2014 mencapai sebesar 6,82 trilyun rupiah, yang terbagi secara proporsional masing-masing 70% untuk Provinsi Papua dan 30% untuk Provinsi Papua Barat. Dana tersebut akan dialokasikan untuk berbagai belanja dan pembangunan yang telah diprogramkan oleh Pemerintah Daerah yang mencakup pembangunan infrastruktur, pembangunan sektoral, belanja modal dan belanja rutin dalam memacu pembangunan di wilayah Papua. Dana tambahan infrastruktur untuk Provinsi Papua Barat sebesar 500 milyar rupiah. Efektivitas dari belanja pembangunan tersebut perlu lebih ditingkatkan, sehingga dapat berdampak nyata terhadap kebutuhan pembangunan di wilayah Papua.

**Gambar 14**  
**Komposisi Belanja Pemerintah Daerah 2013**



Sumber: BPS, 2013

## D. Prospek Pembangunan Tahun 2015

Perkembangan perekonomian di Papua Barat secara makro relatif baik meskipun belum diikuti perkembangan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Tingkat kesenjangan konsumsi masyarakat di Provinsi Papua Barat (indeks gini) selama periode 2008-2013 mengalami peningkatan dari angka 0,31 menjadi 0,43, lebih rendah dari angka nasional yang sebesar 0,35 pada tahun 2008 menjadi 0,4 pada tahun 2013. Kesenjangan output antarkabupaten/kota di Papua Barat tergolong rendah secara nasional, yang menciptakan suasana kondusif bagi penurunan kemiskinan, peningkatan kerukunan sosial, dan penciptaan stabilitas politik dan keamanan.

Percepatan pembangunan ekonomi Papua sangat bergantung pada aksesibilitas wilayah Papua Barat dan konektivitasnya dengan wilayah Kepulauan Maluku (Kota Ambon dan Sofifi) dan Provinsi Papua (Kota Timika) yang merupakan pusat pertumbuhan terdekat di Papua Barat (Kota Sorong dan Manokwari). Peningkatan interkoneksi antardaerah di dalam wilayah Papua Barat dan pengembangan ekonomi lokal memiliki peran penting untuk dilakukan. Dengan demikian, inisiatif pengembangan Ekonomi Wilayah Papua tidak berdampak terhadap peningkatan kesenjangan internal (antardaerah) di wilayah Papua Barat.

Berdasarkan modal pembangunan yang dimiliki dan semakin meningkatnya kinerja pembangunan, prospek pembangunan Provinsi Papua Barat Tahun 2015 dalam mendukung pencapaian target RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran pertumbuhan ekonomi Papua Barat dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 7,9 – 16,6 persen dimungkinkan dapat tercapai dengan meningkatkan optimalisasi potensi sumberdaya yang dimiliki daerah, sejalan dengan peningkatan pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2015 prospek pertumbuhan Kawasan Timur Indonesia akan terus menguat dibandingkan tahun 2014. Prospek pertumbuhan ekonomi yang membaik di wilayah ini terutama karena dukungan kinerja ekonomi Wilayah Papua seiring dengan membaiknya kinerja sektor pertambangan dan industri pengolahan. Produsen utama tembaga di Papua akan memproduksi secara normal kembali sehingga meningkatkan PDRB wilayah.
2. Upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Papua Barat harus dilakukan dengan optimal agar sesuai dengan Buku III RPJMN 2015-2019. Sasaran pengurangan tingkat kemiskinan dalam Buku III RPJMN 2015-2019 adalah 25,6 – 17,4 persen, sedangkan pada tahun 2013 tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat sebesar 26,7 persen, untuk itu diperlukan upaya konsisten untuk menurunkan tingkat kemiskinan di provinsi ini. Selama kurun waktu 2014-2019 Provinsi Papua Barat harus menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 9,3 poin persentase atau 1,55 poin persentase per tahun.
3. Prospek pencapaian sasaran-sasaran utama pembangunan Provinsi Sulawesi Utara akan sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan baik internal daerah Sulawesi Utara maupun lingkungan eksternal. Dampak krisis di Eropa dan pelambatan arus perdagangan global merupakan ancaman eksternal yang bisa mengganggu kinerja



perekonomian daerah, antara lain melalui transmisi perdagangan komoditas ekspor sektor kehutanan dan perikanan.

## **E. Penutup**

### **1. Isu Strategis Daerah**

Dari hasil analisis dan informasi yang tersedia, dan memperhatikan kriteria isu strategis: (i) berdampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional; (ii) merupakan akar permasalahan pembangunan di daerah; dan (iii) mengakibatkan dampak buruk berantai pada pencapaian sasaran pembangunan yang lain jika tidak segera diperbaiki, maka isu-isu strategis Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia
- b. Peningkatan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan.
- c. Peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang berbasis masyarakat
- d. Pengembangan lapangan kerja berkualitas.
- e. Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan interkoneksi antardaerah, meliputi pembangunan jalan raya trans Papua Barat, dan mengoptimalkan transportasi laut
- f. Peningkatan daya tarik investasi pada sektor pangan, perkebunan, dan industri pengolahan non migas
- g. Peningkatan suplai daya listrik

### **2. Rekomendasi Kebijakan**

Penanganan isu-isu di atas diperkirakan dapat meningkatkan kinerja perekonomian daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu disarankan beberapa kebijakan operasional sebagai berikut:

- a. Peningkatan pengembangan ekonomi lokal berbasis masyarakat
- b. Pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna;
- c. Pemberdayaan petani dan nelayan khususnya dalam hal perbaikan akses input produksi (pupuk, benih, pestisida) termasuk peningkatan jaringan irigasi;
- d. Peningkatan kemudahan perijinan usaha;
- e. Peningkatan porsi belanja modal APBD yang diprioritaskan pada sektor infrastruktur dan pengembangan pertanian yang menjadi kewenangan daerah, dan pembangunan SDM.
- f. Pembangunan jaringan jalan dan perbaikan kualitas jalan;
- g. Peningkatan kapasitas/suplai listrik wilayah;
- h. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif: pengendalian inflasi daerah dan peningkatan fungsi intermediasi perbankan di daerah

